

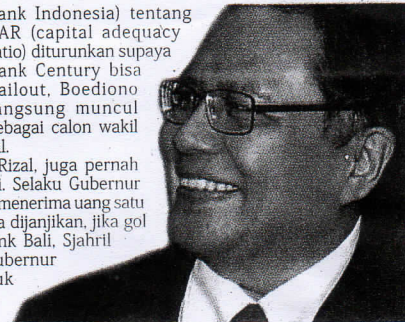


# Dicurigai, Bailout Century Dibarter Jabatan Wapres

**JAKARTA-RK.** Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono mungkin tidak menerima uang skandal Bank Century. Namun dia dicurigai menerima gratifikasi lain, yaitu janji berupa jabatan wakil presiden. Inilah dugaan yang disampaikan ekonom senior, Dr Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/11). Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, Boediono sebelumnya tidak termasuk dari sembilan calon Wapres yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Begitu PBI (Peraturan

Rizal Ramli: JK Pintu Masuk Penuntasan Skandal Century

Bank Indonesia) tentang CAR (capital adequacy ratio) diturunkan supaya Bank Century bisa bailout, Boediono langsung muncul sebagai calon wakil



presiden," ungkap Rizal. Kasus serupa kata Rizal, juga pernah terjadi pada Bank Bali. Selaku Gubernur BI, Sjahril Sabirin tidak menerima uang satu rupiah pun. Namun dia dijanjikan, jika gol pengeluaran uang Bank Bali, Sjahril akan ditunjuk jadi Gubernur Bank Indonesia untuk lima tahun lagi.

■ Halaman 6

## Dicurigai

.....dari halaman 1

"Jadi dalam kasus-kasus kerah putih, gratifikasinya tidak selalu dalam bentuk uang, melainkan bisa juga berupa jabatan. Pelakunya diminta melakukan sesuatu yang sangat merugikan negara," kata Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) itu.

Tudingan Rizal tentang barter bailout Century itu mengacu pada keterangan Mantan Wapres RI, Jusuf Kalla (JK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai skandal Bank Century. Menurutnya, JK bisa menjadi pintu masuk untuk menuntaskan skandal Bank Century yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun. Tidak dilibatkannya JK dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century, menunjukkan adanya niat menggunakan dana publik untuk kepentingan politik.

"Dalam sistem tata negara kita, jika Presiden di luar negeri, maka Wakil Presiden otomatis mengambil alih. Tidak boleh ada keputusan penting di dalam negeri, tanpa sepengetahuan Wapres. Namun ternyata Pak JK sama sekali tidak dilibatkan dalam bailout Bank Century. Ini sangat aneh dan menyalahi prosedur," kata Dr Rizal Ramli, ekonom senior, kepada wartawan, Minggu (24/11).

Keputusan penyelamatan Bank Century diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Meski demikian, lanjut Rizal, sebagai organisasi tersendiri, KSSK juga harus melapor kepada Presiden. Jika Presiden tidak ada, maka laporan disampaikan kepada Wakil Presiden. Pada konteks ini, menjadi aneh kalau Wapres Jusuf Kalla sama sekali tidak diberi laporan proses dan pengam-

bilan keputusan menalangi Bank Century.

"Dari penjelasan Pak Jusuf Kalla di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sudah terang-benderang siapa dalang dari skandal ini, yaitu Boediono yang menyuruh ini. Sebagai Gubernur BI, dia bahkan dua kali mengubah PBI tentang CAR agar Bank Century bisa di-bailout. Jadi, Boediono adalah orang yang paling bertanggungjawab. Kasihan anak buah Boediono yang tidak mengerti apa-apa sudah jadi tersangka dan masuk penjara. Masa tidak ada rasa prihatin dan kesatria dari Boediono," jelas Rizal.

Rizal menyatakan sependapat dengan JK, bahwa tidak sulit menuntaskan skandal Century. Caranya, cukup dengan menelusuri atau follow the money. Langkah tersebut pernah dilakukan saat mengusut skandal Bank Bali, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit aliran dana sampai lima lapis. Dari situ menurut Rizal, bisa diketahui kemana aliran dan siapa saja yang menerima.

"Seharusnya BPK meminta Bank Indonesia melakukan audit aliran dana. Teman-teman saya di BI mengatakan, dalam waktu kurang dari satu bulan, sudah bisa diketahui aliran uang itu kemana saja. Tapi hal itu sengaja tidak dilakukan, untuk melindungi seseorang. Kalau benar-benar mau menuntaskan, minta saja audit. Bisa jadi beberapa account sudah ditutup, karena sudah terlalu lama. Namun tetap bisa diketahui dengan melakukan audit investigasi," usul Rizal.

Dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu, banyak hal aneh pada proses bailout Century. Di seluruh

dunia, operasi penyelamatan bank dilakukan melalui transfer dan dalam tempo hanya beberapa hari. Namun pada Century, bailout justru lebih banyak dilakukan dengan uang tunai dan prosesnya berlangsung berbulan-bulan.

Meski begitu, ujar Rizal, KPK bisa menelusuri aliran dana tunai itu dengan cara menyita buku besar (log book) BI. Pada setiap pengeluaran uang dari BI tercatat dalam buku besar. Di sana terdapat dengan jelas siapa yang menerima, dalam pecahan berapa, bahkan nomor mobil yang mengirim pun ada.

"Sayangnya skandal Century masih berkuat pada FPJP-nya. Sedangkan dana yang Rp6,7 triliun justru belum disentuh KPK. Ini menunjukkan ada upaya intervensi kekuatan tertentu untuk melindungi orang tertentu. Rakyat harus bertanya ke KPK, ada apa? Siapa yang mengintervensi?" tegas Rizal.

### Sejak Awal JK Tidak Dilapori

Rapat 20 November 2008 yang diselenggarakan JK selaku Wapres di kantornya, adalah rapat tentang situasi perekonomian Indonesia secara umum. Rapat yang oleh Boediono disebut rapat besar itu dihadiri menteri terkait termasuk Boediono selaku Gubernur BI saat itu.

"Sesuai penjelasan yang saya peroleh dari Pak Jusuf Kalla, beliau menanyakan satu persatu menteri yang hadir, termasuk kepada Pak Boediono. Boediono pada rapat tersebut menyampaikan paparannya. Dari paparan yang disampaikan Pak Boediono, tidak satupun menyebutkan bahwa Bank Century bermasalah dan butuh bantuan dana sebesar Rp630 miliar," kata Husain Abdullah, Media Of-

ficer JK, Minggu (24/11).

Husain mengatakan, sejak semula JK, sapaan Jusuf Kalla, tidak pernah dilaporkan tentang "nasib" Bank Century. Pada rapat 20 November tersebut Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia tidak memberi laporan tentang kondisi Bank Century.

Karena tidak terdapat hal-hal spesifik terhadap perekonomian nasional, kecuali rupiah terkoneksi menyusul krisis di Amerika menjadi 12.400 rupiah per dolar AS, ujar Husain lagi, rapat saat itu menyimpulkan kondisi perekonomian Indonesia masih baik.

Kesimpulan kondisi perekonomian Indonesia yang masih baik, katanya, juga disampaikan Anggito Abimayu selaku Kepala Badan Pengendalian Fiskal Departemen Keuangan RI dalam jumpa pers sesuai rapat 28 November 2008 digelar sore hari. Anggito menyatakan bahwa kondisi perekonomian nasional masih terkendali.

Makroekonomi Indonesia masih sesuai target dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 6,2 persen dengan perlambatan di kuartal III dan IV. APBN 2008 juga berada dalam titik aman dengan target pencapaian penerimaan naik lima persen di atas APBN-P.

"Anggito juga mengemukakan, surplus APBN 2008 cukup membantu pembiayaan APBN 2009 yang kritis. Defisit juga turun menjadi 1,1 persen terhadap PDB (Rp51 triliun) dari perkiraan 2,1 persen. Surplus bisa dipakai untuk 2009," papar Husain yang menambahkan JK saat ini sedang berada di London untuk menjadi pembicara pada Seminar Perdamaian.

Re-editing: Hamka Saptono